

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Terjemahannya

Dunn, William N., 2003, Penerjemah Samodra Wibawa dkk., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press.

Edward III, George C (edited), 1984, *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England.

Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University Press, New Jersey.

Islamy, M.Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

Keban, Yeremias T.,2009, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta, Gava Media.

Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA.

Moleong, Lexy J. 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT.Remaja Rosdhakarya.

Nakamura, Robert T and FrankSmallwood. 1980. *The Politics of Policy Implementation*, St. Martin Press, New York.

Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Publik*. Jakarta. PT. Elex Media Komputin

Quade, E.S. 1984. *Analysis For Public Decisions*, Elsevier Science Publishers, New York.

Sabatier, Paul. 1986. "Top down and Bottom up Approaches to Implemente Research" *Journal of Public Policy* 6, (Jan), h. 21-48.

Sugiyono, 2003, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.

Subarsono, AG.2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Penerbit Pustaka Pelajar

Tangkilisan. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta. Lukman Offset

Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis.

Van Meter, Donald S., and Carl E Van Horn, 1975, *Administration & Society : The Policy Implementation Process A Conceptual Framework*, Sage Publications Inc., Ohio.

Wahab, Solichin A. 1997. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo Yogyakarta.

Wibawa, Samudra, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wahab, Solichin Abdul., 1990, *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara.

Winarno, Budi, 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Media Presindo.

Zahrah, Muhammad Abu, 1957, *Al-Ahwal Asy-Syakhsyyah*, cet. III, Beirut: Dar Al-Fikr

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Keputusan Menteri Agama Nomor 168 tahun 2000 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama;

Keputusan Menteri Agama Nomor 117 tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama;

Keputusan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA;

Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama;

Instruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Peningkatan Pelayanan Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Terjemahannya

Dunn, William N., 2003, Penerjemah Samodra Wibawa dkk., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press.

Edward III, George C (edited), 1984, *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England.

Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University Press, New Jersey.

Islamy, M.Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

Keban, Yeremias T.,2009, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta, Gava Media.

Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA.

Moleong, Lexy J. 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT.Remaja Rosdhakarya.

Nakamura, Robert T and FrankSmallwood. 1980. *The Politics of Policy Implementation*, St. Martin Press, New York.

Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Publik*. Jakarta. PT. Elex Media Komputin

Quade, E.S. 1984. *Analysis For Public Decisions*, Elsevier Science Publishers, New York.

Sabatier, Paul. 1986. "Top down and Bottom up Approaches to Implemente Research" *Journal of Public Policy* 6, (Jan), h. 21-48.

Sugiyono, 2003, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.

Subarsono, AG.2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Penerbit Pustaka Pelajar

Tangkilisan. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta. Lukman Offset

- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis.
- Van Meter, Donald S., and Carl E Van Horn, 1975, *Administration & Society : The Policy Implementation Process A Conceptual Framework*, Sage Publications Inc., Ohio.
- Wahab, Solichin A. 1997. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo Yogyakarta.
- Wibawa, Samudra, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul., 1990, *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Winarno, Budi, 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Media Presindo.
- Zahrah, Muhammad Abu, 1957, *Al-Ahwal Asy-Syakhsyyah*, cet. III, Beirut: Dar Al-Fikr

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 168 tahun 2000 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 117 tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA;
- Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama;

Instruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Peningkatan Pelayanan Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 5.1.	Distribusi Responden menurut Jenis kelamin	67
Tabel 5.2	Distribusi Responden menurut Umur.....	68
Tabel 5.3	Distribusi Responden Menurut pendidikan.....	68
Tabel 5.4	Distribusi Responden Menurut kedudukan dalam kebijakan.....	69
Tabel 5.5	Pendapat responden tentang pengetahuan kebijakan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/ 369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).....	72
Tabel 5.6	Pendapat Responden tentang pengetahuan tujuan penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Kecamatan.....	75
Tabel 5.7	Pendapat Responden tentang pengetahuan adanya perangkat aturan dalam kebijakan penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah(SIMKAH) Di kecamatan.....	76
Tabel 5.8	Pendapat Responden tentang pengetahuan adanya peraturan tertulis dalam pelaksanaan kebijakan instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/369 Tahun 2013 tentang penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).....	77
Tabel 5.9	Pendapat responden tentang pemahaman peraturan dalam kebijakan intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/369 Tahun 2013 tentang penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).....	77
Tabel 5.10	Pendapat responden tentang ketersediaan sumber daya manusia mendukung kelancaran kebijakan penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).....	79
Tabel 5.11	Pendapat responden tentang ketersediaan sarana dalam dukung kelancaran kebijakan penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah(SIMKAH).....	80
Tabel 5.12	Pendapat responden tentang kesesuaian kebijakan penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Kecamatan.....	82
Tabel 5.13	Pendapat responden tentang kesesuaian kebijakan penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dengan petunjuk pelaksana.....	83
Tabel 5.14	pendapat responden tentang kesesuaian penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dengan kebutuhan masyarakat.....	84
Tabel 5.15	Pendapat responden tentang kesesuaian prosedur kerja dengan intruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor DJ.II/369 Tahun	86

	2013 tentang penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).....	
Tabel 5.16	Pendapat responden tentang kesesuaian prosedur kerja dengan intruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).....	87
Tabel 5.17	Pendapat responden tentang kesesuaian jadwal kerja dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).....	88



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Tangkilisan: kebijakan publik yang membumi, 2000.....	14
Gambar 1.2 Dunn,2003 :25.....	25
Gambar 4.1 PMA 13 Tahun 2012:struktur Organisasi	56
Gambar 5.1 Data Master SIMKAH.....	90
Gambar 5.2 Rekap data IMKAH dan Pencarian Data rekap nikah.....	91
Gambar 5.3 Gambaran Grafik pertahun peristiwa Nikah	92
Gambar 5.4 Rekap Data meliputi No Register, Nama Catin dan tanggal pernikahan.	92
Gambar 5.5 Entry data SIMKAH.....	93



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan SIMKAH pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.....	104
2. Surat Permohonan Izin Penelitian.....	105
3. Surat Keterangan Pelaksanaan/selesai penelitian.....	106
4. Daftar pertanyaa/Kuesioner.....	107
Gambar Kegiatan	109



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tangkilisan: kebijakan publik yang membumi, 2000.....	14
Gambar 1.2	Dunn,2003 :25.....	25
Gambar 4.1	PMA 13 Tahun 2012:struktur Organisasi.....	56





.. 81

Tabel 5.13.	Pendapat responden tentang kesesuaian kebijakan penerapan system informasi manajemet nikah (SIMKAH) Kecamatan.....	83
Tabel 5.14.	Pendapat responden tentang kesesuaian kebijakan penerapan system informasi manajemen nikah(SIMKAH) dengan penunjuk pelaksana.....	84
Table 5.15.	pendapat responden tentang kesesuaian penerapan system informasi manajemen nikah (SIMKAH) dengan kebutuhan masyarakat.....	85
Table 5.16.	Pendapat responden tentang kesesuaian prosedur kerja dengan intruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang penerapan system informasi manajemen nikah(SIMKAH).....	87
Tabel 5.17.	Pendapat responden tentang kesesuaian jadwal kerja dalam penerapan systeminformasi manajemen nikah (SIMKAH).....	88
Tabel 5.18	Pendapat responden tentang kesesuaian program kerja dengan intruksi jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor DJ.II/369 Tahun2013 tentang penerapan system informasi manajemen nikah (SIMKAH).....	89

Tabel 5.1.	Distribusi Responden menurut Jenis kelamin.....	68
Tabel 5.2	Distribusi Responden Menurut Umur	69
Table 5.3	Distribusi Responden Menurut pendidikan.....	70
Table 5.4.	Distribusi Responden Menurut kedudukan dalam kebijakan.....	71
Table 5.6.	Distribusi responden tentang pengetahuan kebijakan Instruksi Direktur Jenderal bimbingan masyarakat islam nomor DJ.II/369 Tahun 2012 tentang penerapan system informasi manajemen nikah (SIMKAH).....	73
Tabel 5.7.	Pendapat Responden tentang pengetahuan tujuan penerapan system informasi manajemen nikah (SIMKAH) Di Kecamatan.....	76
Table 5.8.	Pendapat Responden tentang pengetahuan adanya perangkat aturan dalam kabijakan penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah(SIMKAH) Di kecamatan.....	77
Tabel 5.9.	Pendapat Responden tentang pengetahuan adanya peraturan tertulis dalam pelaksanaan kebijakan intruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang penerapan system informasi manajemen nikah(SIMKAH).....	78
Tabel 5.10.	Pendapat responden tentang pemahaman peraturan dalam kebijakan intruksi direktur jendran Bimbingan Masyarakat Islam nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah(SIMKAH).....	79
Tabel 5.11.	pendapat responden tentang keter sediaan sumber daya manusia mendukung kelancaran kebijakan penerapan system informasi manajemen nikah (SIMKAH).....	80
Tabel 5.12.	Pendapat responden tentang ketersediaan sarana dalam dukung kelancaran kebijakan penerapan system informasi manajemen nikah(SIMKAH).....	

Gambar 5.1
Data Master SIMKAH





Sumber: Buku Manual Simkah Tahun 2016

Gambar 5.2
Data Calon Pengantin

KEDIRI			
KABUPATEN	WILAYAH	KODE	KODEPROP
KEDIRI	KABUPATEN	06	16
MALANG	KABUPATEN	07	16
LUMAJANG	KABUPATEN	08	16
JEMBER	KABUPATEN	09	16
BANYUWANGI	KABUPATEN	10	16
BONDOWOSO	KABUPATEN	11	16
JAKARTA	KOTA	02	13
PROBOLINGGO	KABUPATEN	13	16

b. List box

JEJAKA
JEJAKA
DUDA CERAI
DUDA MATI
DUDA TALAK
BERISTRIB

Sumber: Buku Manual Simkah Tahun 2016



KUISIONER

Bapak/ibu yang saya hormati

Saya Mahasiswa program magister Administrasi publik pada Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area yang sedang melaksanakan penelitian tugas akhir yang berhubungan dengan Implementasi Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj II/369 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan Study pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu. Untuk itu dimohon kepada saudara untuk dapat mengisi kuisisioner ini dengan sejujur jujurnya. Hasil kuisisioner ini tidak di publikasikan melainkan untuk kepentingan penelitian semata.

Atas bantuan, kesediaan waktu, dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Petunjuk pengisian: berilah tanda (X) pada jawaban yang anda pilih

1. Jenis kelamin a. Laki – laki b. Perempuan
2. Umur a. 20-30 b. 31-40 c. 41-50 d. 51-60
3. Tingkat pendidikan a. Sarjana b. Diploma c. SLTA sederajat
4. Kedudukan dalam kebijakan a. Ka. KUA b. Staf KUA kec. c. Staf Kantor Kemenag Kab.
5. Apakah saudara mengetahui ada kebijakan Dirjen Bimas Islam Nomor Dj II/369 tahun 2013 tentang Penerapan SIMKAH ?
 - a. Mengetahui
 - b. Kurang Mengetahui
 - c. Tidak mengetahui
6. Apakah saudara mengetahui tujuan penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan?
 - a. Mengetahui
 - b. Kurang Mengetahui
 - c. Tidak mengetahui
7. Apakah saudara mengetahui adanya perundang-undangan dalam kebijakan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj II/369 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi manajemen Nikah (SIMKAH)?
 - a. mengetahui
 - b. kurang mengetahui
 - c. tidak mengetahui
8. Apakah saudara mengetahui tentang adanya aturan tertulis dalam pelaksanaan kebijakan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj II/369 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi

- manajemen Nikah (SIMKAH)? a. mengetahui b. kurang mengetahui c. tidak mengetahui
9. Apakah saudara memahami dengan baik aturan yang ada tentang pelaksanaan kebijakan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj II/369 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi manajemen Nikah (SIMKAH) a. memahami b. kurang memahami c. tidak memahami
10. Apakah menurut saudara Sumber Daya manusia yang ada di pada kantor kementerian agama mendukung pelaksanaan kebijakan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj II/369 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi manajemen Nikah (SIMKAH)?
a. Mendukung b. kurang mendukung c. tidak mendukung
11. Apakah menurut saudara Sarana prasarana yang ada telah dapat mendukung kelancaran pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj II/369 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan? a. Mendukung
b. Kurang mendukung c. tidak mendukung
12. Apakah menurut saudara kebijakan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj II/369 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA kecamatan telah sesuai dengan peraturan yang ada? a. Sesuai b. Kurang Sesuai
c. Tidak sesuai
13. Apakah menurut saudara kebijakan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj II/369 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA kecamatan telah sesuai dengan petunjuk yang ada? a. sesuai b.
Kurang sesuai c. Tidak sesuai
14. Apakah menurut saudara kebijakan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj II/369 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA kecamatan telah sesuai dengan petunjuk operasional yang ada? a. sesuai
b. Kurang sesuai c. Tidak sesuai
15. Apakah menurut saudara kebijakan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj II/369 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA kecamatan telah sesuai dengan Prosedur Kerja yang ada? a. sesuai
b. Kurang sesuai c. Tidak sesuai

16. Apakah menurut saudara kebijakan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj II/369 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA kecamatan telah sesuai dengan Program kerja yang ada? a. sesuai
b. Kurang sesuai c. Tidak sesuai
17. Apakah menurut saudara kebijakan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj II/369 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA kecamatan telah sesuai dengan jadwal kerja yang ada? a. sesuai b. Kurang sesuai c. Tidak sesuai

Terima kasih atas bantuannya



PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Bapak/ibu yang saya hormati

Saya Mahasiswa program magister Administrasi publik pada Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area yang sedang melaksanakan penelitian tugas akhir yang berhubungan dengan Implementasi Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj II/369 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan Study pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu. Untuk itu dimohon kepada saudara untuk dapat mengisi kuisisioner ini dengan sejujur jujurnya. Hasil kuisisioner ini tidak di publikasikan melainkan untuk kepentingan penelitian semata.

Atas bantuan, kesediaan waktu, dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Bagian I : Pertanyaan Umum

Petunjuk pengisian: berilah tanda (X) pada jawaban yang anda pilih

1. Nama Informan :
2. Jenis kelamin : Laki – laki / Perempuan
3. Umur : Tahun
4. Tingkat pendidikan :
5. Jabatan :

Bagian II

6. Apakah saudara mengetahui ada kebijakan Dirjen Bimas islam Nomor Dj II/369 tahun 2013 tentang Penerapan SIMKAH ?.....
.....
7. Apakah saudara mengetahui tujuan penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan?.....
.....
8. Apakah menurut saudara Sumber Daya manusia yang ada di pada kantor kementerian agama mendukung pelaksanaan kebijakan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj II/369 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi manajemen Nikah (SIMKAH)?
.....
.....

9. Apakah menurut saudara Sarana prasarana yang ada telah dapat mendukung kelancaran pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj II/369 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan?
.....
.....
10. Apakah menurut saudara kebijakan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj II/369 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA kecamatan telah sesuai dengan Program kerja yang ada?
.....
.....
11. Apakah menurut saudara kebijakan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj II/369 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA kecamatan telah sesuai dengan jadwal kerja yang ada?
.....
.....

Terima kasih atas bantuannya